

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasid *Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Fredman*, Tesis Magister Hukum, UIN Malang, 2020
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ahmad Zaenal Fanani, “*Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim*” *Varia Peradilan* Nomor 304 Maret (2011)
- Amanda Zubaidah Aljarofi, *Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis*, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 09, Nomor 02, Desember 2019; ISSN:2089-7480
- Amrulloh, Muhammad Hafidz (2022) *Kebijakan Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri, 2022
- Angga Marzuki, *Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA*. *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020)
- Asep Saepudin, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia*, *Inovasi* 10, no. 4 (2016)
- Assri Mamonto, Dkk, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sah Secara Agama Tetapi Tidak Sah Secara Hukum Positif Indonesia*”, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol.8, No.2, (April-Juni 2020)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018)
- Dewa Putu Tagel, *Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*, *Jurnal Vyavahara Duta* Volume xiv, No. 2, September 2019
- Faida Fidiani, *Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga*, Tesis Magister Hukum, UIN Malang, 2022
- Fakhrullah, *Problem dan Solusi Perkawinan Yang Belum Tercatat Oleh Negara*.
- Febry Azka Nadia, *Perkawinan Belum Tercatat Kajian Undang-undang, Hak Asasi Manusia dan Maqosid Shariah*, *OPINIA DE JOURNAL*, Vol.3No.2, Desember 2023
- Fulthoni Dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Ilrc, 2009)

- Itok Dwi Kurniawan, dkk., *“Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Di Surakarta,”* Jurnal Kerta Semaya 9, no. 10 (2021)
- Itsnaatul Lathifah, *“Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”*, Jurnal Al-Mazahib, Vol. 3, No.1, (Juni 2015)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014)
- Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Kamal Muchtar, *Nikah Sirri di Indonesia*, Jurnal Al Jami`ah No. 56 Tahun 1994
- Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. 26 No. 1 Tahun 2021 Edisi Januari
- Konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Ali, 2012) (dkk, 2009)
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017), hlm.28.
- Memori Penjelasan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tanggal 21 November 1946.
- Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.XVII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Muhammad Romli Muar, *Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif, Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, IAI Al-Qolam, Maqashid (2021) Vol.4. No.1: 31-42

- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Nahak, Alfonsus. 2023. “*Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.*” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2 (3)
- Novum *Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga* : Jurnal Hukum (2022)
- Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Pristiwiyanto, “*Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya*”, *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, (2018)
- Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan PerundangUndangan Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 - September 2017 : h.255 - 274
- Rofik Samsul Hidayat, *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung :Alumni, 1981), hlm.108.
- Santoso, Hari Agus. 2021a. “*Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu.*” *Jatiswara* 36 (3): 325–34.
- Saubari, [https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016](https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016), diakses 22 November 2024
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 71.
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia, 2019), hlm.12
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 162.
- Tsuroya Kiswati dkk, *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003, h.151.
- Unita Elisabeth, <https://mail.dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/237> diakses pada 8 Agustus 2024

- Wahyu Wibisana, "*Pernikahan Dalam Islam*", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, (2016), hlm.191
- Yoachim Agus Tridianto, *Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 9.
- Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Ciamis:Guepedia, 2019), hlm.29.
- Zudan Arif Fakhrullah, *Problem dan Solusi Perkawinan Yang Belum Tercatat Oleh Negara, Webinar Kartu Keluarga Siri, Solusi dan Problematikanya*, (Jakarta: Majelis Nasional Forhati, 2021).
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch
- <https://kbbi.web.id/adil>
- <https://mail.dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/237>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>